

**DAMPAK PROGRAM SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT)
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI
KECAMATAN BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Fx Anddre D.R. Gunawan

NPP. 29.1746

Asdaf Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua

Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: anddredwi07@gmail.com

ABSTRACT

Community empowerment is important in the realization of general welfare. Community empowerment has the aim of building people's awareness and willingness to improve their own welfare. One of the empowerment programs in Biak Numfor Regency is the Integrated Marine and Fisheries Center Program (SKPT). This research is based on the policy impact theory according to William Dunn which has six criteria to measure the success of the program. The research aims to determine the impact of the program in improving the welfare of the fishing community and the problems that occur in the implementation of the SKPT program in Biak Numfor. This study also describes the steps and efforts made in overcoming obstacles in the implementation of the SKPT program. The research method used is a descriptive qualitative method. Retrieval of data sources using the method of observation, interviews, and documentation. Technical data collection is carried out by collecting data, presenting data, reducing data, and verifying data. The results of the study based on the criteria based on the policy impact theory show that the implementation of the SKPT program has a good impact on improving the welfare of the fishing community by providing assistance to the fishing community so that it is more optimal in obtaining fish catches. However, the obstacles and problems that occur related to the implementation of the SKPT program have made this program not run optimally in accordance with the objectives of the SKPT program. Suggestions related to this research are expected by the Biak Numfor Regency government and the Marine Service to implement the SKPT program, namely that local governments and agencies pay attention to the implementation of the SKPT program so that it is implemented as planned, stipulates policies related to regulations or regulations to overcome abuse of the SKPT assistance program, and is needed attention and the government to assist in solving the problems faced by fishing communities in Biak Numfor Regency.

Keywords: Empowerment, Community, SKPT Program

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang penting dalam terwujudnya kesejahteraan umum. Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk membangun kesadaran dan kemauan rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri. Salah satu program pemberdayaan di Kabupaten Biak Numfor yaitu Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Penelitian ini berdasarkan

teori dampak kebijakan menurut William Dunn yang memiliki enam kriteria untuk mengukur keberhasilan program. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program SKPT di Biak Numfor. Penelitian ini juga mendeskripsikan langkah dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan program SKPT. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif deskriptif. Pengambilan sumber data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis pengambilan data dilakukan dengan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan verifikasi data. Hasil penelitian berpatokan dari kriteria berdasarkan teori dampak kebijakan menunjukkan pelaksanaan program SKPT berdampak baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat nelayan sehingga lebih optimal dalam memperoleh hasil tangkap ikan. Akan tetapi adanya kendala dan permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan program SKPT membuat program ini belum berjalan secara maksimal sesuai dengan tujuan program SKPT. Saran terkait dalam penelitian ini diharapkan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Dinas Kelautan pelaksanaan program SKPT yaitu agar pemerintah daerah dan pihak dinas memperhatikan pelaksanaan program SKPT agar pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan, penetapan kebijakan terkait regulasi atau peraturan untuk menanggulangi penyalahgunaan terhadap program bantuan SKPT, dan dibutuhkan perhatian dan pemerintah untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Biak Numfor.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Program SKPT

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara dan strategis di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, dan juga dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudra Pasifik (<https://id.wikipedia.org>). Menurut letak astronomisnya, Indonesia berada antara 6° LS - 11° LS dan 95° BT - 141° BT. Indonesia termasuk salah satu negara terluas dan merupakan negara terluas di Asia Tenggara dengan luas 5.193.250 km² yang memiliki 17.508 pulau. Banyaknya kekayaan alam di darat dan juga di laut yang beragam dapat menjadi modal yang besar dalam mengembangkan dan mengelolanya terutama di bidang perikanan dan juga pariwisata, didukung wilayah lautan Indonesia dengan luas 3.273.810 km², sedangkan luas daratannya sekitar 1.919.440 km² (<https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id>). Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di wilayah pesisir dan bergantung pada sumber daya laut yang mana apabila masyarakat tidak bekerja di bidang lain, maka mereka akan beralih pada sektor kelautan maupun perikanan. Akan tetapi jika hal ini tidak disertai dengan kemampuan pengelolaan sumber daya laut yang belum optimal maka akan menimbulkan permasalahan dalam perolehan hasil laut yang diakibatkan dari penggunaan cara penangkapan yang salah sehingga dapat merusak kelestarian ekosistem laut dan menyebabkan kerugian dari hasil laut kedepannya.

Pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir termasuk tugas pemerintah pusat, namun hal tersebut telah dipercayakan kepada pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan daerah mempunyai kekuasaan untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi serta tugas penunjang dan juga diberikan kewenangan otonomi sebesar-besarnya. Tujuannya adalah agar terciptanya kesejahteraan bersama dalam aspek pembangunan, pemberdayaan, pelayanan dan partisipasi masyarakat. Dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan dimana kesejahteraan masyarakat sesuai dengan otonomi

daerah menunjukkan adanya kepedulian dan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat berdasarkan dengan kondisi, ciri khas daerah dan potensi unggul daerah tersebut. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan perekonomian daerah dengan serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Kebijakan dan program pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah kesejahteraan masyarakat daerah dapat terwujud dengan adanya peran aktif dari masyarakat.

Kabupaten Biak Numfor berada di Provinsi Papua yang terletak di pulau tersendiri di sebelah utara Pulau Papua. Letak wilayah Kabupaten Biak Numfor berada pada koordinat $0^{\circ} 21' - 1^{\circ} 31'$ Lintang Selatan dan $134^{\circ} 47' - 136^{\circ} 48'$ Bujur Timur yang tingginya 0-1000 meter di atas permukaan laut. Biak Numfor terdiri dari gugusan pulau di daratan Papua bagian utara dan berhadapan dengan Samudera Pasifik. Posisi ini membuat Kabupaten Letak Biak Numfor sangat bagus dalam membangun hubungan dengan negara lain dalam kaitannya dengan wilayah laut. Biak Numfor merupakan 2 pulau kecil yaitu Biak dan Numfor dimana luasnya 5,11 persen daerah Provinsi Papua (Wikipedia Ensiklopedia, 2017). Tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah salah satunya dapat diketahui dengan melihat tingkat kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Faktor kemiskinan dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan kesejahteraan suatu daerah. Masyarakat suatu daerah dikatakan sejahtera apabila masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor terkait hal ini menjalankan sebuah perencanaan dalam menunjang pemberdayaan masyarakat terkhusus terhadap masyarakat nelayan di Kabupaten Biak Numfor. Program SKPT dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ditujukan khusus untuk membantu dalam perkembangan terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan demi mencapai kesejahteraan. Program SKPT memiliki tujuan meningkatkan aktivitas usaha dalam bidang kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan masyarakat dengan pengoptimalan dan peningkatan sarana dan prasarana dalam memanfaatkan sumber daya laut dan perikanan terpadu.

Yang menjadi rencana strategis Kabupaten Biak Numfor di bidang kelautan dan perikanan yaitu Program SKPT di Biak mulai dilaksanakan pada tahun 2018 dimana pelaksanaan dan pengembangannya yang ada dalam program SKPT dijelaskan sebagai berikut ini :

1. Pembangunan Perikanan Tangkap.

Dalam pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap, bantuan pertama berupa kapal ikan ukuran 3 GT pada tahun 2018 sebanyak 50 unit dan pada tahun 2019 sebanyak 50 unit. Kedua yaitu bantuan alat penangkapan ikan pada tahun 2018 berupa pancing tonda sebanyak 50 paket yang tiap paket terdiri dari 9 set yaitu tali utama, tali sambung, kili-kili, mata pancing pemberat dan penggulung. Ketiga yaitu pembangunan pangkalan pendaratan ikan yang difungsikan untuk tempat bongkar muat ikan. Keempat yaitu pembangunan dermaga tempat berlabuh dan bersandarnya kapal yang pembangunannya dimulai pada awal tahun 2020. Kelima yaitu pembangunan fasilitas umum seperti jalan, IPAL, pos jaga, listrik kawasan, sistem drainase, dan menara air.

2. Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran.

Dalam pembangunan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran dimana yang pertama *Integrated Cold Storage* (ISC) yaitu tempat pengelolaan hasil tangkap dilengkapi mesin pendingin. Kedua yaitu *Ice Flake Mesin* (IFM) merupakan sarana dan prasarana pembuatan es. Ketiga yaitu *Chest Freezer* dan *Cool Box* yang merupakan tempat penyimpanan beku produk perikanan sementara. Keempat yaitu pembangunan dan pengembangan Pasar Ikan Bosnik dan Fandoi yang digunakan sebagai tempat pemasaran hasil perikanan.

Program untuk mengembangkan perikanan tangkap atau Program SKPT memiliki tujuan mengembangkan produksi perikanan dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang juga dimana ini terkait dengan pendapatan yang berhubungan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu perlu diketahui usaha apa saja yang dilakukan oleh pihak dinas dan juga masyarakat nelayan penerima program ini dalam mewujudkan keberhasilan program.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan masyarakat nelayan di Biak Numfor terkait peningkatan perekonomian masyarakat nelayan. Yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya laut yang masih sangat tradisional, dimana masyarakat nelayan masih menggunakan alat tangkap yang tergolong tradisional. Peralatan yang pakai yaitu pancing (*handline* dan rawal) serta jaring insang (*gill net*). Dimana dengan penggunaan alat tangkap yang masih tradisional, perolehan hasil tangkap nelayan dapat dikatakan masih kurang optimal dari potensi kelautan dan perikanan yang tinggi.

Masih kurangnya teknologi atau armada penangkap ikan, dimana dalam proses penangkapan ikan, nelayan masih menggunakan Perahu Tanpa Motor (PTM), Perahu Motor Tempel (PMT), dan kapal motor. Armada penangkapan ikan yang paling banyak digunakan yaitu perahu tanpa motor sebesar 71,03 % dari total 5.498 perahu di tahun 2017. Sedangkan tahun 2018 jumlah perahu tanpa motor meningkat menjadi 74,80 % dari total 6.860 perahu, sementara pada 2018 terdapat peningkatan perahu motor tempel sebesar 8% dari jumlah pada 2017. Pada tahun 2018, Kecamatan Biak Kota tercatat memiliki jumlah unit armada perikanan tangkap terbesar dimana jumlah perahu tanpa motor yaitu 1.085, perahu motor tempel sebanyak 423 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor, 2019a).

Keadaan sarana dan prasarana seperti pangkalan pendaratan ikan untuk tempat aktivitas bisnis dan juga dermaga perikanan untuk tempat kapal perikanan berlabuh masih kurang memadai. Pangkalan pendaratan ikan yang masih berupa lahan kosong dan jauh dari higienis. Dermaga tempat bersandarnya kapal, serta mendaratkan ikan hasil tangkapan nelayan yang hanya dapat digunakan oleh kapal besar, semenyara kapal yang berukuran kurang dari 5 GT hanya bisa tambat labuh pada kondisi tertentu. Pada kondisi ini nelayan harus menyandarkan kapal cukup jauh dari area dermaga.

Kesadaran masyarakat mengenai program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah masih kurang. Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan kurang memiliki kreativitas dalam mengembangkan profesinya sebagai nelayan dan hanya menjadikan profesi nelayan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan harian saja. Program pemberdayaan yang diberikan terhadap masyarakat nelayan diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai program pemberdayaan tersebut dan juga pemahaman mengenai pentingnya program tersebut bagi kehidupan masyarakat nelayan ke depannya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor terkait hal ini menjalankan sebuah perencanaan dalam menunjang pemberdayaan masyarakat terkhusus terhadap masyarakat nelayan di Kabupaten Biak Numfor. Program SKPT dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ditujukan khusus untuk membantu dalam perkembangan terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan demi mencapai kesejahteraan. Program SKPT memiliki tujuan meningkatkan aktivitas usaha dalam bidang kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan masyarakat dengan pengoptimalan dan peningkatan sarana dan prasarana dalam memanfaatkan sumber daya laut dan perikanan terpadu.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mengenai latar belakang diatas maka masalah-masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas hasil tangkapan ikan yang didapatkan oleh nelayan yang menyebabkan rendahnya pendapatan dari jual hasil tangkapan ikan tersebut.
2. Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh nelayan di Biak Numfor. Masyarakat hanya memanfaatkan apa yang bisa digunakan untuk menghadapi permasalahan yang ada.
3. Kurangnya kesadaran individu nelayan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan potensi diri dalam meningkatkan kesejahteraan.
4. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya laut yang ada yang dimana dikarenakan belum adanya teknologi atau fasilitas yang memadai dalam menangkap atau pun mengelola hasil perikanan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Abdul Rahim pada tahun 2011 melakukan penelitian mengenai analisis pendapatan usaha tangkap nelayan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di wilayah pesisir pantai Sulawesi Selatan dengan lokasi penelitian Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Barru dan Sinjai, dimana permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya perbedaan pendapatan oleh masyarakat nelayan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui besarnya pendapatan dan *explanatory method* untuk menganalisis faktor yang mempengaruhinya. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha tangkap nelayan digunakan pendekatan model *Unit Output Price Cobb-Douglas Profit Function*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa besar-kecilnya pendapatan secara positif dipengaruhi oleh harga bahan bakar, produktivitas, umur, dan alat tangkap, sedangkan secara negatif dipengaruhi oleh lamanya waktu melaut, dan perbedaan wilayah penangkapan. Pada 2013, Wijayanti dan Ihsannudin melakukan survey untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan di Kecamatan Pademawu Provinsi Jawa Timur, dimana permasalahan dalam penelitian ini mengenai kemiskinan masyarakat nelayan yang disebabkan oleh *overfishing* atau banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai nilai berbanding terbalik dengan hasil tangkapan lautnya dan juga disebabkan oleh kurangnya kualitas sumber daya manusia serta produktivitas hasil tangkapan laut. dalam penelitian ini, penentuan lokasi secara sengaja/*purposive* dan menggunakan metode pendekatan analisis kualitatif dimana data primer didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan juga angket. Hasil penelitian dari survey yang dilakukan menunjukkan bahwa kemiskinan di yang terjadi lokasi penelitian dipengaruhi oleh faktor alam, kultur, dan struktur. Strategi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan masih dipengaruhi kebijakan pemerintah. Tahun 2020, Aqidah, Rustam, dan Ernarningsih, melakukan penelitian untuk mengetahui keadaan ekonomi nelayan, tingkat kesejahteraan dan strategi dalam peningkatan kesejahteraan nelayan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan, kurangnya perhatian pemerintah dalam pemberian sarana dan prasarana serta pemberian upaya peningkatan SDM melalui program-program. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dan juga menggunakan analisis SWOT. Data diperoleh dengan metode survey dimana data primer didapatkan dengan kuesioner, wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa keadaan ekonomi nelayan terpengaruh dari penghasilan nelayan, usia, pendidikan, sarana dan prasarana dalam menangkap ikan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan tentang meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui program yang diberikan oleh pemerintah. Penelitian dilakukan lebih difokuskan kepada dampak dari program pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan. Pengukuran indikator dalam penelitian ini menggunakan pendapat dari William Dunn (2003) mengenai evaluasi kebijakan dengan memenuhi 6 kriteria yaitu efektivitasn efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, dan ketepatan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara langsung mengenai dampak program SKPT meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan program SKPT

II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena mampu mengeksplorasi makna dari pengalaman dan penerapan Program SKPT. Sedangkan pendekatan induktif dimaksudkan sebagai pendekatan yang menggali pengalaman kemudian membangun konstruksi ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman subjek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumnetasi. Dalam pengumpulan data kualitatif, wawancara dilakukan oleh penulis terhadap 10 informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Biak Numfor, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengelolaan Hasil Perikanan, Camat Biak Kota, dan 5 Masyarakat Nelayan penerima program SKPT. Adapun dalam analisis data dimana Teknik yang digunakan dengan tahapan Reduksi data, Penyajian data, dan kemudian kesimpulan. Teori dalam analisis yang digunakan yaitu menurut William Dunn (2003) mengenai evaluasi kebijakan dengan memenuhi 6 kriteria yaitu efektivitasn efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, dan ketepatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis mengenai dampak program Sentra Kelautan dan Perikana Terpadu (SKPT) dalam meingkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor menggunakan pendapat menurut William Dunn (2003) mengenai evaluasi kebijakan dengan memenuhi 6 kriteria yaitu efektivitasn efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, dan ketepatan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Efektivitas

Penulis melakukan pengukuran terhadap efektivitas program SKPT dengan dilihat pada efektivitas sebelum pelaksanaan program, saat program dilaksanakan, dan juga setelah pelaksanaan program.

Tabel 1.

Nilai Capaian Produksi Tahun 2016-2020

NO.	TAHUN	PRODUKSI (TON)
1.	2016	62.749
2.	2017	76.678,5
3.	2018	82.673
4.	2019	84.188,47
5.	2020	84.252,97

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Biak 2020

Tabel 2.
Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan Dan Subsektor Di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2017-2020

NO.	KECAMATAN	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1.	Numfor Barat	3.623	3.628	5.545	5.927,783
2.	Orkeri	2.321	2.322	2.986	3.127,783
3.	Numfor Timur	-	-	-	5.827,783
4.	Bruyadori	1.309	1.318	2.347	2.527,783
5.	Poiru	2.313	2.316	4.092	4.697,783
6.	Padaido	4.301	4.302	8.052	8.127,783
7.	Aimando	4.901	4.902	7.843	8.027,783
8.	Biak Timur	4.341	4.343	4.972	5.227,783
9.	Oridek	3.092	3.094	3.172	3.327,783
10.	Biak Kota	2.345	2.350	9.572	10.023,783
11.	Samofa	-	-	-	1.044,781
12.	Yendidori	4.675	4.680	3.364	3.327,783

13.	Biak Utara	2.521	2.522	4.532	4.727,783
14.	Andey	-	-	581	844,781
15.	Warsa	2.651	2.652	4.298	4.627,783
16.	Yawosi	0.911	0.912	1.117	1.577,783
17.	Bondifuar	1.721	1.722	1.671	1.577,783
18.	Biak Barat	2.311	2.312	3.571	4.827,783
19.	Swandiwe	1.123	1.126	2.783	2.827,783
	Jumlah	45.566	45.608	84.188,47	84.252,97

Sumber: Bidang Produksi Perikanan Tahun 2020

Untuk mengetahui efektivitas suatu program dapat diawali dengan sosialisasi mengenai pengenalan program. Hal ini untuk memberikan pengenalan mengenai program sebagai awal untuk keberhasilan berjalannya program tersebut. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk pemberian materi atau pengetahuan mengenai program yang akan dilakukan oleh pihak dinas kepada sasaran penerima program. Untuk mencapai keberhasilan program selain dilaksanakan sosialisasi, perlu juga adanya pembekalan berupa pemberian keterampilan dalam mengelola sumber bantuan yang diberikan.

Dari hasil yang didapat penulis yakni efektivitas dalam pelaksanaan program telah berjalan dengan baik dimana dapat diketahui dari prosedur persyaratan yang ditetapkan oleh pihak dinas bagi calon peserta penerima bantuan program SKPT yaitu :

- a. Merupakan nelayan dari daerah Biak Numfor
- b. Berbentuk kelompok atau KUB (Kelompok Usaha Bersama) yang terdiri dari 10 orang nelayan
- c. Termasuk anggota KUB yang tergabung dalam Koperasi yang menerima program SKPT.

Dalam menentukan siapa yang dapat menerima bantuan program SKPT, diserahkan kewenangan kepada Penyuluh dan perwakilan dari Dinas Perikanan untuk melakukan survey dan melihat kondisi dan keadaan nelayan di daerah Biak Numfor yang menerima program SKPT.

Setelah pelaksanaan program, efektivitas dapat diketahui dari evaluasi yang dilakukan oleh pihak Dinas dan pihak terkait. dapat diketahui bahwa program bantuan ini sudah digunakan oleh para nelayan penerima bantuan program SKPT dan berpengaruh kepada naiknya tingkat perekonomian masyarakat nelayan. Hasil lainnya yang ditemukan penulis dimana manajerial SKPT melakukan penilaian kembali ke lokasi pemberian bantuan disertai dengan penyuluh perikanan untuk menilai apakah alat bantuan yang diberikan telah digunakan dengan baik dan benar. Pengawasan tersebut dilakukan sekali dalam beberapa bulan setelah pelaksanaan pemberian bantuan program SKPT.

Dari data **tabel 1** dan **tabel 2** diatas dapat diketahui produksi perikanan Kecamatan Biak Kota terjadi peningkatan setelah adanya program SKPT yaitu dari tahun 2017 sampai 2020 dimana pada tahun 2020 sebanyak 10.023,783 Ton dan juga harga rata rata dari komoditas utama hasil laut di Biak Numfor.

Berdasarkan hasil yang dalam segi dampak dimana program SKPT memberikan dampak jangka pendek terkait peningkatan pendapatan nelayan yang signifikan. Akan tetapi terkait dampak jangka panjang masih belum dapat diketahui dikarenakan masih terjadi ketidakstabilan dalam pencapaian

produksi perikanan tangkap. dengan ini dapat disimpulkan dalam segi dampak dalam efektivitas dimana program SKPT sangat membantu dan berpengaruh dalam peningkatan perekonomian nelayan.

3.2. Efisiensi

Penulis melakukan pengukuran terhadap efisiensi dalam pelaksanaan program SKPT dimana Efisiensi dapat ditentukan dengan menghitung biaya per unit produk atau jasa. Jika tujuan yang dicapai oleh program atau kebijakan lebih besar dari hasil yang dicapai, maka kegiatan tersebut mubazir dan tidak dapat diulang.

Tabel 3.

Realisasi dan Pagu APBN KKP Untuk program SKPT Biak

No	Tahun	Pagu (Rp. Miliar)	Realisasi (Rp. Miliar)
1	2017	57,31	29,91
2	2018	21,20	19,39
3	2019 (Pagu)	10,82	

Sumber: Laporan Tahunan SKPT 2019

Pada **tabel 3** merupakan realisasi dan pagu APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk program SKPT yang ada di Biak Numfor. Anggaran tersebut merupakan anggaran yang dipersiapkan untuk pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana program SKPT. Terkait hal ini berhubungan dengan hasil wawancara mengenai peserta lelang terhadap penyediaan barang dalam program SKPT, ini dimana pelaksanaan penyediaan barang dapat dilaksanakan jika pagu anggaran berada di atas 1M. Penunjukan pelelangan dilakukan jika pagu anggaran berada di bawah 1M. Hal ini sesuai dengan Perpres pengadaan barang dan jasa untuk daerah Papua.

Hasil yang ditemukan penulis tentang efektivitas program dalam memberikan dukungan terhadap program SKPT didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Biak Numfor dan koperasi. Kemudian diberikan kepada sekelompok nelayan yang mendapat bantuan. Anggaran dalam pengadaan bantuan diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan mekanisme yang ada dan juga mengupayakan efisiensi dalam pengeluaran anggaran. Pengadaan dan penyediaan barang program SKPT diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. diketahui mengenai pengadaan barang terkait program SKPT dilakukan secara lelang. Informasi mengenai peserta lelang tidak diketahui oleh pelaksana SKPT di Kabupaten Biak Numfor akan tetapi peserta lelang merupakan pilihan terbaik dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

3.3. Kecukupan dalam Program SKPT

Dunn (2013) menjelaskan kecukupan dalam suatu kebijakan dapat dikatakan tujuan yang ingin dicapai telah dirasakan mencukupi berbagai hal. Kecukupan berhubungan dengan efektivitas, dengan

mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memenuhi kebutuhan, nilai dan juga kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berdasarkan data pada tabel pencapaian hasil produksi perikanan pada **tabel 1** mengenai hasil produksi perikanan dimana hasil temuan yang penulis dapatkan yakni dalam pencapaian program SKPT Pada Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2020 dalam tujuan peningkatan produksi perikanan belum tercapai secara optimal, dikarenakan faktor sistem dan kendala dalam memenuhi kebutuhan nelayan yang juga dikarenakan terkena dampak pandemic covid-19 seperti harga BBM yang cukup tinggi dan juga memenuhi kebutuhan lainnya yang susah didapatkan. Adanya fishing ground nelayan yang terbatas dan juga keadaan cuaca yang kurang menyebabkan nelayan kesulitan dalam melaut dan mendapatkan hasil tangkap yang kurang. Faktor lainnya juga terkait harga pasar yang tidak menentu yang menyebabkan kerugian terhadap nelayan. terkait juga dengan harga jual hasil tangkap ikan dimana terjadi perbedaan antara harga jual ikan di pasar serta harga jual pada ICS yang menjadi tempat penampungan ikan hasil tangkap nelayan.

Tujuan pembangunan ICS (*Integrated Cold Storage*) yaitu sebagai tempat penampungan ikan yang tidak habis terjual oleh nelayan di pasar. Akan tetapi kurangnya pengetahuan nelayan mengenai salah satu bangunan sebagai batuan dari program SKPT ini menyebabkan kesalahpahaman mengenai pemasaran dan harga jual dari hasil tangkap ikan tersebut. Temuan ini ditemukan penulis dari beberapa nelayan yang menerima program bantuan SKPT. Upaya dan kebijakan diperlukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Akan tetapi yang ditemukan penulis dimana pihak dinas dan manajerial SKPT Biak Numfor belum memberikan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

3.4. Perataan dalam program SKPT

Dalam kebijakan publik, perataan dapat diartikan sebagai keadilan yang diberikan dan diperoleh melalui suatu tujuan. Standar kesetaraan terkait erat dengan rasionalitas hukum dan sosial dan mengacu pada distribusi hasil dan upaya di antara kelompok sosial yang berbeda.

Tabel 4

Daftar Koperasi Penerima Bantuan SKPT Di Biak Numfor

NO	NAMA KUB	ALAMAT		KETUA
		DESA	DISTRIK	
1	Diapari Pakimi	Fandoi	Biak Kota	Sadrak Maniani
2	Diapari	Fandoi	Biak Kota	Robert Karubaba
3	Woonaki	Mandala	Biak Kota	Frits A. Kirihio
4	Impan	Ambroben	Biak Kota	Thomas L. Wakum
5	Busdori	Inggiri	Biak Kota	Simon Daundi
6	Maninei Inggiri	Inggiri	Biak Kota	Lamudi

7	Mangginin	Inggiri	Biak Kota	Septinus Sroyer
8	Batu Karang	Inggiri	Biak Kota	Frengki Raubaba
9	Kobeoser Inggupi	Inggiri	Biak Kota	Michael Aryafan
10	Waupnor Putra	Waupnor	Biak Kota	La Iwalu
11	Kobe Oser	Insrom	Biak Kota	Leon Rejauw
12	Tadori	Adoki	Yendidori	Martinus Asyerem
13	Bintang Fajar	Adoki	Yendidori	Daud Asyerem
14	Pamkinak	Adoki	Yendidori	Yesaya Asyerem
15	Tebing Putih	Adoki	Yendidori	Florens Msen
16	Tumember	Samber	Yendidori	Erkanus Binwasef
17	Naso Babo	Samber	Yendidori	Hosea Msen
18	Yopari	Samber	Yendidori	Nikolas Y Mirino
19	Mansar Serer	Samber	Yendidori	Frans Mampioer
20	Arembo	Samber	Yendidori	Yan Viky Binwasef
21	Wardav	Samber	Yendidori	Henok Titus Mirino
22	Fanjur Wosi	Samber	Yendidori	Buce H. Rum-brawer
23	Kanggandi	Samber	Yendidori	Kristian Mirino
24	Sobari	Samber	Yendidori	Frins Mansnembra
25	Somboy	Samber	Yendidori	Hendrikus Yarangga
26	Flotim	Woniki	Biak Timur	Yoseph Making
27	Diruwi	Pasi	Padaido	Bernadus Kafiari

28	Oser	Owi	Biak Ti- mur	Elon Rumpaidus
29	Supraima	Supraima	Aimando	Rasi Rumbiak
30	Berkat Sore	Soryar	Biak Ti- mur	Maklion Panelada
31	Matahari Terbit	Korem	Biak Utara	Apner Dimara
32	Fanindi	Korem	Biak Utara	Titus Dimara
33	Bosen Raswan	Rosayendo	Biak Utara	Hendrik Koibur
34	Raras Muwai	Soor	Yawosi	Yakobus Rumbrar
35	Swan Krob	Karmon	Yawosi	Sem Brabar
36	Madirai	Asur	Yawosi	Orgenes Wonar
37	Manggini	Korem	Biak Utara	Frans Lot Erbo
38	Pulau Pombo	Saukobyte	Biak Utara	Moses Kapit
39	Sonar Kayam	Andei	Biak Utara	Moses Wabiser
40	Maninei	Warbon	Biak Utara	Gad Dimara
41	Faduru	Mandenderi	Swandiwe	Mathias Bonsapia
42	Samara	Mandenderi	Swandiwe	Demianus AP
43	Samyos	Farusi	Swandiwe	Charles Adadikam
44	Abar Sosbari	Farusi	Swandiwe	Melkisedek Adadi- kam
45	Bonjos	Farusi	Swandiwe	Salmon Adadikam
46	Karob Kyar	Farusi	Swandiwe	Soleman Adadi- kam
47	Swan Dibo	Farusi	Swandiwe	Orgenes Bonsapia

48	Menanti Fajar	Farusi	Swandiwe	Balzar Bonggoido
49	Yando	Farusi	Swandiwe	Apolos Awom
50	Usaha Baru	Farusi	Swandiwe	Stefanus Bonsapia

Sumber: Laporan Manajerial SKPT tahun 2021

Kebijakan yang berorientasi pada keadilan adalah kebijakan di mana hasil dan upaya dibagi secara adil. Data penerima program SKPT terdapat pada tabel 4 mengenai daftar penerima program SKPT dimana sasaran penerima program yaitu kelompok usaha bersama (KUB) nelayan yang sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan sebagai penerima program SKPT.

Dalam perataan penyaluran program SKPT dimana perataan dalam penyaluran program ini sudah berjalan dengan baik. Dimana bantuan yang diberikan kepada kelompok nelayan yang termasuk dalam penerima program SKPT dan dalam pembagian bantuan program SKPT secara adil dan merata serta sesuai dengan yang diharapkan.

Adanya keterbatasan dalam pemberian bantuan program SKPT dalam anggaran sehingga ketersediaan bantuan hanya ditetapkan dan tidak dapat diberikan kepada seluruh masyarakat nelayan yang ada. Oleh karena itu ditetapkan syarat dalam menjadi penerima program ini dan juga berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh penyuluh perikanan sebagai wakil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menentukan dan menetapkan siapa yang direkomendasikan menjadi penerima bantuan program SKPT ini.

3.5. Responsivitas dalam Program SKPT

William Dunn menjelaskan dalam teori evaluasi kebijakan dimana responsivitas yaitu Suatu respon terhadap suatu aktivitas, berupa sasaran kebijakan public atas penerapan suatu kebijakan. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari tanggapan yang diberikan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memikirkan pengaruh yang mungkin terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk positif yang berupa dukungan sedangkan penolakan sebagai bentuk negatifnya.

Suatu program dapat dikatakan berhasil jika direspon dengan baik oleh masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan sangat menyadari dan memahami tujuan dari program tersebut. Masyarakat nelayan yang menjadi sasaran seharusnya merasa mendapat manfaat dari program ini, tetapi jika respon dari masyarakat nelayan yang menjadi sasaran belum merasa kebutuhannya terpenuhi, apa yang membuat respon mereka semakin buruk, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang belum berjalan dengan baik.

respon masyarakat nelayan mendukung keberlanjutan program ke depan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Laut. Hanya saja nelayan ingin meminta perhatian lebih yaitu mengenai permasalahan terkait perawatan kapal yang menjadi program bantuan yang rusak yang menyebabkan nelayan tidak bisa melaut dan juga penetapan sistem baru untuk menekan masalah penjualan bantuan program SKPT yang dilakukan oleh nelayan penerima bantuan.

Tingkat kepedulian masyarakat nelayan terhadap berhasilnya program ini dapat dikatakan masih kurang karena tidak semua nelayan mau ikut berpartisipasi untuk mengawasi dan juga mengikuti tujuan dari program ini. Tingkat kepedulian antar sesama nelayan juga masih kurang dimana tidak

semua nelayan mau memberikan informasi terkait adanya program bantuan ini sehingga dapat dikatakan masih tinggi tingkat egoisme masyarakat.

3.6. Ketepatan dalam Program SKPT

Ketepatan berkaitan dengan nilai atau nilai tujuan program dan kekuatan asumsi yang mendasari tujuan tersebut. Kriteria yang digunakan dalam memilih alternatif untuk digunakan sebagai rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan adalah pilihan yang layak untuk tujuan tersebut.

program ini sudah tepat untuk dilaksanakan dimana program ini sangat berpengaruh dan berdampak positif untuk mengatasi permasalahan perekonomian masyarakat nelayan. Berdasarkan data capaian produksi pada **tabel 1** dimana terjadi peningkatan dalam jumlah produksi perikanan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa program SKPT berdampak terhadap perkembangan ekonomi masyarakat nelayan.

Program ini mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan nelayan yang menerima bantuan program SKPT ini yang telah memanfaatkan bantuan program dengan baik dan benar. Dengan bantuan dalam bentuk tempat untuk menjual hasil tangkapan serta kapas dan alat bantu untuk menangkap ikan tersebut maka pendapatan nelayan lebih terjamin dan meningkat daripada sebelum adanya program ini. Dalam hal bantuan alat tangkap yang diberikan telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat nelayan.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) sebagai salah satu program pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat nelayan. Temuan penting yang ditemukan penulis dimana adanya perhatian pemerintah terhadap kondisi nelayan sehingga dilaksanakan program SKPT yang difokuskan kepada masyarakat nelayan yang juga didukung dengan bantuan pihak swasta.

Keterbatasan kemampuan dan juga sarana prasarana sangat berpengaruh dalam memperoleh hasil mata pencaharian termasuk masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan salah satu program pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan untuk membantu nelayan agar dapat lebih berkembang. Dengan dilaksanakannya program SKPT akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nelayan. Hal ini didasarkan dengan adanya bantuan yang diberikan berupa perahu tangkap, *chestfreezer*, alat pancing, kompas dan juga ICS (Integrated Cold Storage) sebagai tempat pengolahan ikan hasil tangkap. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada dampak dari pelaksanaan program SKPT terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pada dasarnya pelaksanaan program SKPT telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan perencanaan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya penulis menemukan kendala, dimana masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait program SKPT, kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan program SKPT dan juga terkait permasalahan hak ulayat tanah atau pembebasan tanah adat di lokasi pembangunan program SKPT. Kendala-kendala tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan program pemberdayaan yang diberikan dan juga kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap program pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat keberhasilan dalam program SKPT yang dilaksanakan di kabupaten Biak Numfor provinsi Papua yakni masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya program pemberdayaan yang diberikan, pengawasan dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan program SKPT dan juga masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

IV. KESIMPULAN

Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dilaksanakan di Biak Numfor berdasarkan teori dampak menurut William Dunn dengan indikator meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, ketepatan dan responsivitas, memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari hasil pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program SKPT berdampak pada nelayan dalam berbagai indikator yang dijelaskan. Pada segi efektivitas program dimana memberikan pengaruh yang positif dalam perkembangan nelayan dalam peningkatan produksi dan juga pendapatan yang sebelumnya mendapatkan hasil ikan yang sedikit kemudian terjadi peningkatan saat adanya program SKPT. Pada segi efisiensi dalam penggunaan anggaran yang telah sesuai dalam memenuhi perlengkapan yang dibutuhkan nelayan penerima program. Pada segi kecukupan dalam pemberian alternative kebijakan telah diberikan akan tetapi masih belum berjalan dengan baik karena masih terjadi permasalahan terkait kebutuhan dan juga pemahaman terkait program SKPT oleh nelayan. Pada segi perataan dalam penyaluran bantuan program SKPT dimana telah dilakukan dengan baik dan kepada nelayan yang terdaftar sebagai penerima program yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Pada segi ketepatan dimana program SKPT sangat tepat untuk dilaksanakan karena program ini sangat bermanfaat bagi nelayan. Kemudian pada segi responsivitas dimana respon yang diberikan dari masyarakat nelayan yang merupakan sasaran dari program SKPT ini sangat mendukung keberlangsungan program. Ketercapaian program dalam pelaksanaannya memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya program pemberdayaan yang ada dan keberlangsungan hidup yang lebih terjamin, ketersediaan kebutuhan nelayan dalam mengelola hasil perikanan lebih optimal dengan alat bantu tangkap yang lebih modern dan fasilitas yang mempermudah dan membantu dalam pengelolaan hasil perikanan. Serta perhatian pemerintah akan pentingnya pemberdayaan masyarakat nelayan lebih terjamin dan juga dalam hal pengawasan dalam pelaksanaan program pemberdayaan.
2. Dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program SKPT, berbagai cara dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak dinas demi mencapai tujuan dari pelaksanaan program SKPT tersebut dan juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada latar belakang dalam penelitian ini. Upaya yang dilakukan seperti mengoptimalkan pemanfaatan program SKPT dengan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nelayan, membuat regulasi dan peraturan terkait program SKPT, melakukan pengawasan dengan rutin dalam pelaksanaan program SKPT, memahami dan membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan melakukan kerjasama dengan pihak adat yang memiliki hak atas daerah. Dengan mengatasi kendala ini, program SKPT dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan program ini yaitu demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu dan juga informan penelitian yang dimana tidak selamanya berada di tempat karena memiliki manta pencaharian sebagai

nelayan. Penelitian hanya dilakukan pada satu kecamatan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat William Dunn.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya dan kurang maksimalnya hasil penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama untuk mengetahui keberlanjutan keberhasilan program dan juga dilakukan penelitian pada lokasi yang lainnya yang juga terdapat program SKPT di daerah tersebut sebagai pembandingan dalam pelaksanaan dan juga keberhasilan program SKPT.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Biak Numfor beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu pada saat pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajagrafindo.
- Dunn, W. (1981). *Public Policy Analysis And Introduction*. Prentice Hall.
- Dunn, W. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Gajah Mada Press.
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Mardikanto, T., & Poerwoko, S. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Nawawi, Z. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Rajawali Press.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Santosa, P. (2009). *Administrasi Publik Teori Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama.
- Soleh, C. (2014). *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Fokusmedia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. PT Refika Aditama.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis*. Intermedia.
- Widoyoko, E. P. (2009). *Evaluasi Program Pembelajaran*. Pustaka Belajar.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan masyarakat : wacana & praktik*. Kencana.

B. Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2015 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, (2015).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, (2009).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014).

C. Karya Ilmiah

- Anwar, A. N. R. (2018). *IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN NELAYAN DI DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN*.
- Aqidah, Rustam, & Ernaningsih. (2020). *STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN KECIL DI DESA TOKKE KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU*

- UTARA. *Journal of Indonesian Tropical Fisheries*, 3, 67–78.
- Chryshna, M. (2021). *Hari Nelayan Nasional: Potensi Kelautan dan Potret Nelayan Indonesia*. Kompaspedia.Kompas.Id. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hari-nelayan-nasional-potensi-kelautan-dan-potret-nelayan-indonesia>
- Mushlihin. (2013). *Memahami Definisi Operasional dalam Penelitian*. <http://mushlihin.com/2013/11/penelitian/memahami-definisi-operasionaldalam-penelitian.php>
- Rahim, A. (2011). ANALISIS PENDAPATAN USAHA TANGKAP NELAYAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI WILAYAH PESISIR PANTAI SULAWESI SELATAN. *Sosial Ekonomi Kelautan DAN Perikanan*, 6.
- Rahmanto, D. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau Untung Jawa Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Kemandirian Nelayan. *Jurnal Hukum*.
- Sabarisman, M. (2017). IDENTIFIKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PESISIR THE IDENTIFICATION AND EMPOWERMENT OF POOR COASTAL COMMUNITIES. *Sosio Informa*, 3.
- Sitompul, N. R. (2015). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DESA SILO BARU MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN DESA PESISIR TANGGUH (PDPT). *Ilmu Administrasi*, 12, 267 – 288.
- Wijayanti, L., & Ihsannudin. (2013). *STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN*. 2, 139–152.

D. Sumber Lain

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor. (2019a). *LAPORAN PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) BIAK TAHUN 2015 – 2019*. [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/SKPT/90 Biak/Data/LAPORAN TAHUNAN SKPT BIAK_2015-2019.pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/SKPT/90_Biak/Data/LAPORAN_TAHUNAN_SKPT_BIAK_2015-2019.pdf)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor. (2019b). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Biak Numfor 2019*. <https://biaknumforkab.bps.go.id/publication/2019/12/30/7be7699eb7aeaabc1e476b77/statistik-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-biak-numfor-2019.html>
- Kemdikbud. (2017). *Letak dan Luas Indonesia*. <https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Letak-dan-Luas-Indonesia--2017/menu4.html>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2019). *Masterplan SKPT Biak Numfor*. <https://kkp.go.id/SKPT/Biak/page/1473-masterplan-skpt-biak-numfor>
- Wikipedia Ensiklopedia. (2017). *Kabupaten Biak Numfor*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Biak_Numfor
- Wikipedia Ensiklopedia. (2021). *Indonesia*. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indonesia&action=history>